



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA



**TRIWULAN II
2024**

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Mina Bahari III
Jl. Medan Merdeka Timur
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tim Penyusun

Dr.Lilly Aprilia Pregiwati, S.Pi, MSi	Pengarah
Dessi Arisandi, S.Pi, M.SE	Ketua
Redi Wibowo, A.Md	Anggota
Moh. Ismail Adiyaksa N, S.Si	Anggota
Sarli Assajdah, A.Md	Anggota
Erlan Nurcahya Putra S.I.K	Anggota
Fitra Aditama, S.St.Pi	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Pusat Pelatihan KP dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Pusat Pelatihan KP selama triwulan kedua tahun 2024.

Selama triwulan II tahun 2024, Pusat Pelatihan KP telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada triwulan II tahun 2024, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Pusat Pelatihan KP.

Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pada bidang pelatihan kelautan dan perikanan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya selama triwulan II pada tahun 2024.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Pusat Pelatihan KP, dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 18 Juli 2024

Plt. Kepala Pusat Pelatihan KP,



Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

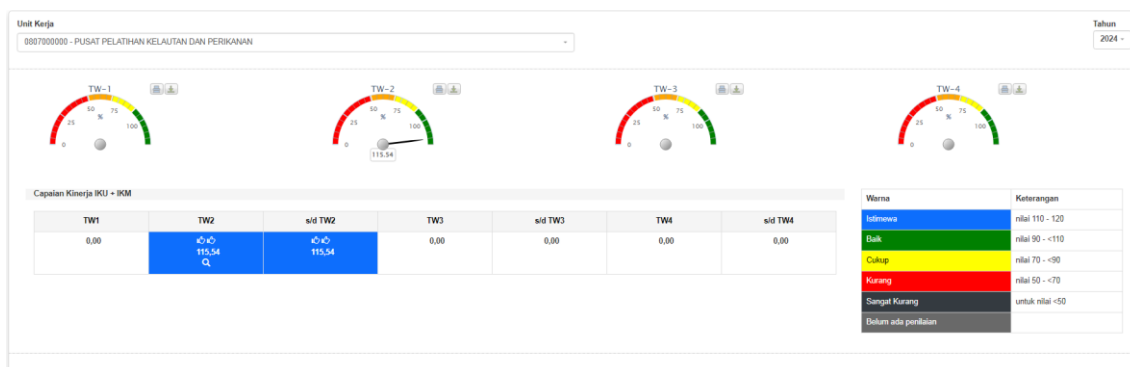
Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP tahun 2024. Perjanjian Kinerja tersebut, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan KP tahun 2020-2024, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan PK April Tahun 2024 mempunyai target tahunan untuk persentase lulusan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri sebesar 72%, pelatihan sebanyak 35.173 orang masyarakat yang dilatih, nilai PNBPN satker lingkup Pusat Pelatihan KP sebesar 13.416 M, 122 tenaga kerja yang terlibat di lingkup Pusat Pelatihan KP, 1.450 orang SDM KP yang bersertifikat kompetensi, lulusan pelatihan yang membentuk start up sebanyak 147 orang, 5 paket materi pelatihan berbasis Kaji Widya, 4 NSPK, 7 lembaga pelatihan tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan, 75% usulan sertifikasi program diklat masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang disahkan sesuai peraturan yang berlaku, 12 jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindak lanjuti, 6 sarana pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti, 5 prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya, pelatihan aparatur KP 5.165 orang, 1 akreditasi lembaga penyelenggara diklat aparatur, 10% partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi *corpu* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 5 lembaga/instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan dan IKU dukungan manajemen antara lain persentase layanan dukungan manajemen, unit kerja yang lolos penilaian WBK, nilai rekonsiliasi kinerja, persentase unit kerja yang menerapkan MP terstandar, indeks profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP, batas tertinggi nilai temuan laporan hasil temuan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP, inovasi pelayanan publik

yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP, dan penilaian mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP.

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja organisasi Pusat Pelatihan KP pada triwulan II tahun 2024 adalah **115,54% - ISTIMEWA** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Gambar 1. Screenshot Nilai NKO Aplikasi Kinerjaku Pusat Pelatihan KP Triwulan II

Capaian Penetapan Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan. Capaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Triwulan II ini adalah:

1. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih dengan target triwulan II sebanyak 21.126 orang dan capaian sebesar 26.228 orang (120%);
2. Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP dengan target triwulan II sebanyak Rp5,94 Milyar dan capaian sebesar Rp10,13 Milyar (120%);
3. SDM KP yang bersertifikat kompetensi dengan target triwulan II sebanyak 428 orang dan capaian sebesar 666 orang (120%);
4. Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target TW II sebanyak 8 kerjasama dan capaian 9 kerjasama (112,5%);
5. Aparatur KP yang dilatih dengan target triwulan II sebanyak 2.920 orang dan capaian sebesar 3.404 orang (116,58%);
6. Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP dengan target TW II sebanyak 50% dan capaian sebesar 55% (110%);

7. Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target 94% dan capaian sebesar 111,80% (118,94%);
8. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP dengan target 76 dan capaian sebesar 80,57 (106,01%)
9. Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Pusat Pelatihan KP dengan target 82% dan capaian 82% (100%)

Dari sisi anggaran, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pusat Pelatihan KP memiliki Pagu awal sebesar Rp. 379.269.496.000 dan pagu yang aktif sebesar Rp. 365.601.980.000 Berdasarkan data, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, realisasi keuangan Pusat Pelatihan KP dan UPT sebesar Rp. 208.773.630.751 atau sebesar 57,58% dari Pagu Aktif. Untuk Pusat Pelatihan KP sendiri memiliki pagu awal sebesar Rp.16.615.261.000 dan pagu aktif dengan jumlah yang sama. Realisasi anggaran Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 7.360.406.432 yakni 44,30 % dari Pagu Aktif Pusat Pelatihan KP.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II tahun 2024 capaian kinerja *output* program sudah semuanya tercapai, namun demikian untuk menghasilkan kualitas hasil kinerja yang optimal dimasa-masa mendatang dalam penyelenggaraan program perlu melakukan berbagai hal analisa sebagai berikut:

1. Akselerasi kegiatan pelaksanaan pelatihan yang realisasinya masih sedikit di Triwulan III
2. Mengadakan Pertemuan pendampingan data dukung dengan Satker lingkup Pusat Pelatihan KP secara kontinu;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi prioritas KKP dan Nasional.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I - Pendahuluan	2
Latar Belakang	2
Maksud dan Tujuan.....	2
Tugas dan Fungsi	3
Keragaan SDM.....	4
Potensi dan Permasalahan	7
Sistematika Penulisan.....	9
Bab II - Perencanaan Kinerja	11
Rencana Strategis 2020-2024	11
Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden	11
Tujuan	12
Sasaran Kegiatan.....	12
Rencana Kerja Tahun 2024	16
Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Pengukuran Kinerja.....	18
Bab III - Akuntabilitas Kinerja	23
Prestasi Kinerja Pusat Pelatihan KP	23
Evaluasi dan Analisis Kinerja	23
Akuntabilitas Keuangan	60
Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pelatihan KP	63
Bab IV - Penutup	67
Capaian Kinerja Utama	67
Permasalahan dan Rekomendasi.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Pegawai Puslat KP berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan II 2024.....	5
Tabel 2. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Golongan/Ruang Triwulan II 2024	5
Tabel 3. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Pendidikan Terakhir Triwulan II 2024.....	5
Tabel 4. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Kelompok Umur Triwulan II 2024	5
Tabel 5. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Kelompok Jabatan Triwulan II 2024.....	5
Tabel 6. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP.....	6
Tabel 7. Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024	16
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024	17
Tabel 9. Indeks Capaian IKU.....	21
Tabel 10. Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024 pada Pusat Pelatihan KP	24
Tabel 11. Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih.....	27
Tabel 12. Masyarakat KP yang Dilatih Sesuai Satker.....	28
Tabel 13. Masyarakat KP yang Dilati Per Jenis Pelatihan	28
Tabel 14. Capaian IKU Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP	30
Tabel 15. Rekap IKU Nilai PNPB Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP	30
Tabel 16. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi	33
Tabel 17. Rekap Sertifikasi Kompetensi per Satker	33
Tabel 18. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi perbidang usaha	34
Tabel 19. Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti.	40
Tabel 20. Rekap Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP.....	40
Tabel 21. Capaian IKU Aparatur KP yang dilatih	43
Tabel 22. Capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP	45
Tabel 23. Rekap Dokumen Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan KP	46
Tabel 24. Capaian IKU Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang tersandar.....	51
Tabel 25. Bobot Komponen Kualifikasi Perhitungan MP.....	52
Tabel 26. Bobot Komponen Kompetensi Perhitungan MP	52
Tabel 27. Bobot Komponen Kinerja Perhitungan MP.....	52
Tabel 28. Bobot Komponen Disiplin Perhitungan MP	53
Tabel 29. Kategori Nilai IP ASN	54
Tabel 30. Capaian IKU IP ASN Lingkup Puslat KP	54
Tabel 31. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan.....	56
Tabel 32. Perbandingan IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya.....	56
Tabel 33. Realisasi Keuangan Lingkup Pusat Pelatihan KP	60
Tabel 34. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan II Tahun 2024	61
Tabel 35. Link Data Dukung Capaian IK	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Nilai NKO Aplikasi Kinerjaku Pusat Pelatihan KP Triwulan II	iii
Gambar 2. Struktur Organisasi Puslat KP berdasarkan PermenKP No. 5 Tahun 2024	4
Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Pelatihan	7
Gambar 4. Tampilan Kinerjaku	23
Gambar 5. Formula perhitungan MP (Sumber : Dok Manual IKU)	50
Gambar 6. Rumus Perhitungan IP ASN (Sumber : Manual IKU)	54



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



pendahuluan

BAB I - PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai Pusat Pelatihan KP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan KP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Adapun dasar hukum dari pembuatan laporan kinerja ini antara lain :

- a. PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja INstansi Pemerintah
- b. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. Perpres Nomor 38 tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- h. Kepmen KP 205 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan II Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Pusat Pelatihan KP kepada Kepala BPPSDM KP selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2024;
- b. Memberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pusat Pelatihan KP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pelatihan KP Triwulan II Tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala BPPSDM KP selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Pusat Pelatihan KP;
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Pelatihan KP.

Tugas dan Fungsi

- a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024, BPPSDM merupakan eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPPSDM didukung oleh unit kerja eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDM, Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan. **Pusat Pelatihan KP mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.**

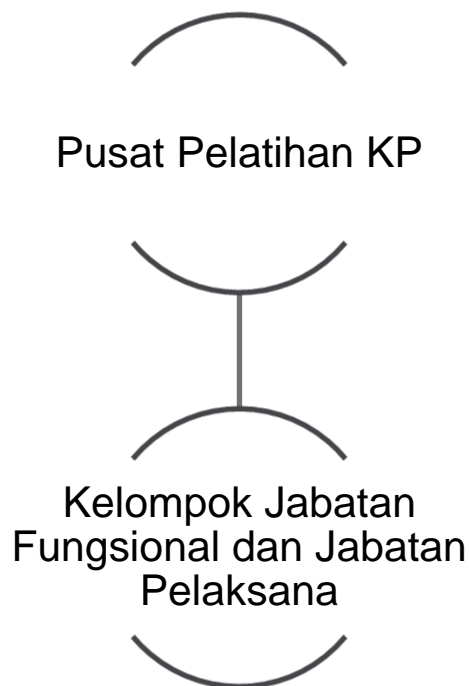
- b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Pusat Pelatihan KP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 4) Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- 5) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

- 6) Pelaksanaan sertifikasi profesi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
 - 7) Pelaksanaan pengembangan kemitraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
 - 8) Pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
 - 9) Pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
 - 10) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
 - 11) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.
- c. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



Gambar 2. Struktur Organisasi Puslat KP berdasarkan PermenKP No. 5 Tahun 2024

Keragaan SDM

Pada triwulan II tahun 2024, setelah turunnya Perpres Nomor 38 tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mengalami perubahan SOTK menjadi Pusat

Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Perubahan SOTK ini disusul dengan perubahan komposisi pegawai di triwulan II. Adapun komposisi pegawai Pusat Pelatihan KP di Triwulan II 2024 yakni :

Tabel 1. Distribusi Pegawai Puslat KP berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan II 2024

CPNS & PNS		Jumlah	%		PPPK		Jumlah	TOTAL
L	P		L	P	L	P		
30	20	50	60	40	2	0	2	52

Tabel 2. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Golongan/Ruang Triwulan II 2024

Golongan/ Ruang				Jumlah	PPPK	TOTAL
I	II	III	IV			
	4	30	16	50	2	52

Tabel 3. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Pendidikan Terakhir Triwulan II 2024

Pendidikan CPNS dan PNS							Pendidikan PPPK				TOTAL
SD	SLTP	SLTA	DI/D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah	S2/S1/D4/D3	
		6		5	2	14	20	1	50	2	52

Tabel 4. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Kelompok Umur Triwulan II 2024

Kelompok Umur CPNS dan PNS									Kelompok Umur PPPK						TOTAL			
≤ 25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	≥ 56	≥ 57	≥ 58	Jumlah	≤ 25	25-35	36-45	46-55		≥ 56	≥ 58	Jumlah PPPK
		2	11	14	9	10	2	1	1	50			2				2	52

Tabel 5. Distribusi Pegawai Puslat KP Berdasarkan Kelompok Jabatan Triwulan II 2024

Jabatan											Jumlah	PPPK		
eselon I.a	eselon II.a	eselon II.b	Es III.a	Es III.b	Es IV.a	Es IV.b	V	JFTertentu	JF Umum					
	1										31	18	52	2

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, Pusat Pelatihan KP dibantu oleh 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, yaitu Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan-Sumatera Utara, BPPP Tegal-Jawa Tengah, BPPP Banyuwangi-Jawa Timur, BPPP Bitung-Sulawesi Utara, dan BPPP Ambon-Maluku.

Kebijakan Kepala Pusat Pelatihan KP berkaitan dengan strategi pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan adalah:

- 1) Untuk pelatihan bagi Aparatur, mengutamakan diklat mandatory, yaitu diklat prajabatan dan diklat bagi calon tenaga fungsional;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai KKP untuk

- mendapatkan diklat;
- 3) Mendorong adanya pengembangan jenis dan metode pelatihan;
 - 4) Mengupayakan perencanaan pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan;
 - 5) Membuat kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi dan monitoring;
 - 6) Mendorong pencapaian sasaran dengan memanfaatkan anggaran diluar Pusat Pelatihan KP melalui kerjasama program pelatihan;
 - 7) Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana standar pelatihan secara bertahap;
 - 8) Memberikan informasi pelatihan secara cepat, terkini dan akurat kepada *stakeholders*;
 - 9) Mendorong tersedianya kurikulum dan media belajar bagi pelatihan teknis dan fungsional;
 - 10) Memacu standarisasi pelatih dan tenaga pengelola pelatihan,;
 - 11) Memberikan kesempatan bagi setiap pelatih dan tenaga pengelola pelatihan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengisi, membina dan mengembangkan kompetensi jabatan atau kompetensi kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan didukung oleh SDM yang profesional di bidang kepelautan, konservasi, penangkapan ikan, kampung nelayan maju, budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta manajemen. Berbagai upaya peningkatan mutu tenaga kepelatihan terus dilakukan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari masyarakat tentang pelayanan yang lebih baik.

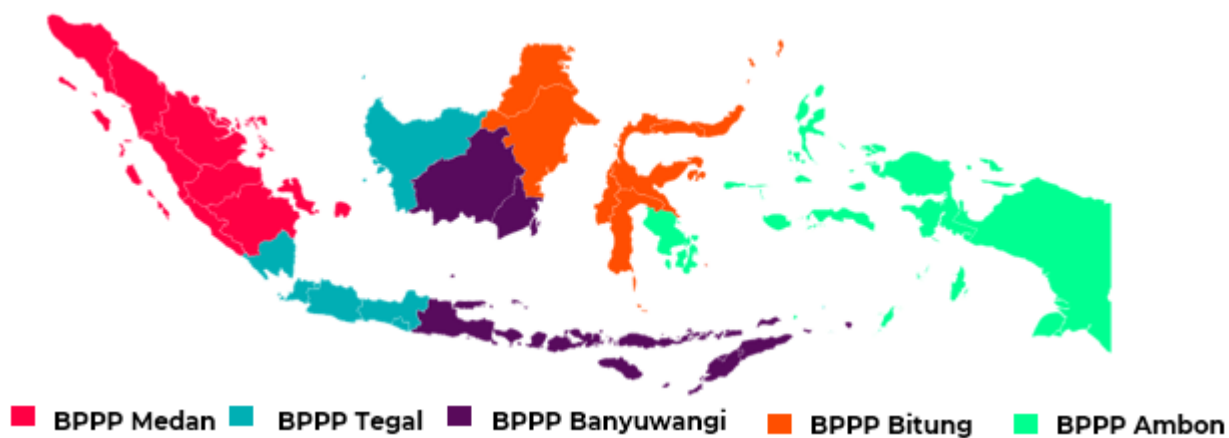
Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan penjamin mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang KP, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan memiliki wilayah pelatihan yang secara keseluruhan dapat melayani pelatihan di seluruh Indonesia.

Tabel 6. Wilayah Pelatihan UPT Pelatihan KP

No.	Satuan Kerja	Wilayah Pelatihan (Provinsi)	Keterangan
1.	BPPP Medan	Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumsel	9 Provinsi, 127 Kabupaten/Kota
2.	BPPP Tegal	Lampung, Banten, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DI Yogyakarta, Kalbar, Kalteng	8 Provinsi, 98 Kabupaten/Kota

3.	BPPP Banyuwangi	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalsel	5 Provinsi, 64 Kabupaten/Kota
4.	BPPP Bitung	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Kaltim Kalut	7 Provinsi, 79 Kabupaten/Kota
5.	BPPP Ambon	Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sultra	5 Provinsi, 57 Kabupaten/Kota
6.	BDA Sukamandi	Seluruh Indonesia	34 Provinsi

WILAYAH KERJA BALAI PELATIHAN



Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tertentu, Pusat Pelatihan KP dan UPT Pelatihan dapat mendatangkan Pelatih dari luar instansi guna memberikan mata pelatihan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau kondisi aktual di lapangan.

Potensi dan Permasalahan

Masalah dan tantangan tentunya dihadapi oleh Pusat Pelatihan KP dalam kiprahnya dalam mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP secara keseluruhan.

Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam khususnya di bidang pelatihan diantaranya:

- A. Aspek pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, dukungan terhadap sumberdaya pelatihan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM-KP yang mendesak untuk dipecahkan secara sistematis dan konsisten. Permasalahan dalam pengembangan SDM-KP dalam bidang pelatihan, diantaranya:

- a) Rendahnya realisasi pelatihan kampung nelayan maju, pengembangan budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan gerakan partisipasi nelayan
 - b) Kebutuhan akan Tenaga Pelatih (instruktur dan widyaiswara) baik untuk di Balai Pelatihan dan P2MKP yang masih kurang dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang diampu;
 - c) Sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di P2MKP, mengingat jenis pelatihan dan kondisi P2MKP yang bervariasi;
 - d) Sebaran dan jangkauan pelatihan belum merata sesuai dengan sasaran pelatihan, khususnya pelatihan yang dipersiapkan mendukung program prioritas KKP;
 - e) Penyediaan kurikulum/modul Pelatihan belum sepenuhnya terstandarisasi sehingga diperlukan standarisasi kurikulum/modul pelatihan;
 - f) Perekrutan peserta latih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan program nasional dan kementerian;
 - g) Masih rendahnya jumlah masyarakat KP yang kompeten dan belum meratanya kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat KP di setiap wilayahnya;
 - h) Pemetaan kebutuhan SDM KP yang kompeten dalam rangka pengelolaan sumber daya KP yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan masih jarang dilakukan;
 - i) Minimnya upaya peningkatan kapasitas dan kelembagaan sesuai dengan standar penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
 - j) Standarisasi kompetensi masih terbatas jumlahnya;
 - k) Dukungan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pelayanan belum memadai;
 - l) Belum optimalnya lembaga pelatihan KP dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur KP, kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- B. Aspek Pelaku utama/usaha yang menjadi sasaran utama pelatihan perikanan diantaranya:
- a) Tingkat pendidikan dan kompetensi relatif rendah;

- b) Usaha yang dikembangkan masih secara parsial dengan teknologi terapan konvensional;
 - c) Skala luasan usaha kecil, individual dan variatif, tersebar tidak dalam suatu kawasan/wilayah pengembangan;
 - d) Produk yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk produk primer.
- C. Akses pelaku utama terhadap kelembagaan inovasi dan kelembagaan ekonomi masih lemah; Masih terdapat kesenjangan hasil antara hasil nyata di lapangan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengkajian yang telah direkomendasikan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan kinerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala sampai dengan tahun 2024.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi, aspek strategis organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan SDM di Pusat Pelatihan KP.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Pelatihan KP tahun 2020-2024, Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja Tahun 2024, serta metode Pengukuran Kinerja.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya, serta Akuntabilitas Keuangan
- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.
- 6) **LAMPIRAN**, berisi lampiran PK awal dan PK Revisi Pusat Pelatihan KP Tahun 2024.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



perencanaan kinerja

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan menyangkut dengan persoalan produksi dan pendapatan yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Nasional adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Nasional yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa Aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Program Utama Kegiatan Prioritas Presiden

Kementrian Kelautan dan Perikanan siap mendukung dan melaksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu:

- 1) Membangun sumber daya manusia (SDM);
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- 3) Menghapus kendala regulasi;
- 4) Menyederhanakan birokrasi, dan;
- 5) Melakukan transformasi ekonomi.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan SDM;
- 2) Pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
- 3) Peningkatan pengawasan SDKP;

- 4) Industrialisasi kelautan dan perikanan;
- 5) Peningkatan usaha dan investasi;
- 6) Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual; dan
- 7) Komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Kebijakan Pembangunan KKP merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Nasional dalam rangka mencapai sasaran strategi pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024. Dengan demikian Kebijakan Pusat Pelatihan KP adalah:

- 1) Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
- 2) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
- 4) Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi teknologi dan pelatihan.

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh Pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

- 1) SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- 2) SS-2 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- 3) SS-3 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat

- 4) SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
- 5) SS-5 Tatakelola SDKP bertanggung jawab
- 6) SS-6 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- 7) SS-7 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif
- 8) SS-8 Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas.

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM Tahun 2020-2024, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- 1) SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri
- 2) SP-2 SDM KP Peserta Diklat untuk Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)
- 3) SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan
- 4) SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
- 5) SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan
- 6) SP-6 Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM

Untuk melaksanakan pencapaian Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPPSDM. Oleh karena itu, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2024 mengacu pada sasaran program BPPSDM yang diturunkan dari sasaran strategis KKP yaitu ;

Sasaran Kegiatan (SP-1) “Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri dari 70% pada tahun 2023 menjadi 72% pada tahun 2024.
- 2) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih target pada Tahun 2024 sebanyak 35.173 orang, dan kumulatif target tahun 2020-2024 sebanyak 121.226 orang.
- 3) Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP dari target 3,99 Milyar Rupiah pada Tahun 2022 menjadi 13,416 Milyar Rupiah pada tahun 2024.
- 4) Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 ini ditargetkan sebanyak 122 orang, sementara selama periode Renstra 2020-2024 jika dikumulatifkan target tenaga kerja yang terlibat di lingkup Pusat Pelatihan KP adalah sebanyak 26.546 orang.

Sasaran Kegiatan (SP-2) “SDM KP Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) SDM KP yang bersertifikat kompetensi target pada Tahun 2024 sebanyak 1.450 orang dan secara kumulatif target 2020-2024 sebanyak 4.308 orang.

Sasaran Kegiatan (SP-3) “Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) dari target pada Tahun 2024 sebanyak 147 orang dan secara kumulatif tahun 2020-2024 sebanyak 478 orang.
- 2) Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket) dari target 5 pada tahun 2024 dan kumulatif target tahun 2020-2024 sebanyak 41 paket Kajiwidya.

Sasaran Kegiatan (SP-4) “Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang disusun (NSPK) target NSPK pada tahun 2024 sebanyak 4 NSPK, dan untuk target berdasarkan reviu Renstra 2020-2024 secara kumulatif adalah sebanyak 23 NSPK.
- 2) Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan dengan target 2024 sebanyak 7 lembaga, dan untuk target berdasarkan reviu renstra 2020-2024 adalah sebanyak 7 lembaga.
- 3) Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan target 2024 sebesar 75%. IKU ini baru muncul di 2024.
- 4) Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan target 12 PKS pada tahun 2024, dan berdasarkan target Renstra total tahun 2020-2024 adalah sebanyak 46 PKS.

Sasaran Kegiatan (SP-5) “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pulatluh KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2024 sebanyak 6 unit serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 39 unit.
- 2) Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target tahun 2024 sebanyak 5 unit serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 19 unit.

Sasaran Kegiatan (SP-6) “Aparatur Yang Dididik dan Dilatih” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Aparatur KP yang dilatih dengan target tahun 2024 sebanyak 5.165 orang serta target selama periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 22.690 orang.
- 2) Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur dengan target tahun 2024 sebanyak 1 Lembaga. IKU ini baru muncul di 2024.
- 3) Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 10%. IKU ini baru muncul di 2024.
- 4) Lembaga/Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan dengan target 5 lembaga. IKU ini baru muncul di 2024.

Sasaran Kegiatan (SP-7) “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker” dengan indikator kinerja sesuai dengan PK Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP target setiap tahun nya adalah 100%.
- 2) Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP dengan target tahun ini 1 satker dan sampai dengan tahun 2024 ini sebanyak 6 Satker lingkup Pusat Pelatihan KP berpredikat WBK.
- 3) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP dengan target 87 pada tahun 2021 menjadi 94 pada tahun 2024.
- 4) Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar dengan target 82 pada tahun 2020 menjadi 94 pada tahun 2024.
- 5) Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP dari 72 pada tahun 2020 menjadi 81 pada tahun 2024.
- 6) Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP sebesar $\leq 1\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 0,5\%$ pada tahun 2024.
- 7) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP, sebesar 60% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.
- 8) Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP dengan target 1 inovasi setiap tahunnya selama 2022-2024.
- 9) Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP dengan target nilai sampai 2024 sebanyak 81.

Rencana Kerja Tahun 2024

Adapun kegiatan prioritas Pusat Pelatihan KP termasuk UPT Pelatihan KP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kinerja utama yaitu:

1. Pelatihan Masyarakat.

Pelatihan masyarakat akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 35.173 orang, yang difokuskan kepada pelatihan-pelatihan dengan metode *blended*/campuran dan pelatihan klasikal. Pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Diklat, yaitu: BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Aertembaga, dan BPPP Ambon.

2. Pelatihan Aparatur.

Pelatihan aparatur bagi 5.165 orang ASN KKP adalah sebagai upaya KKP untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur KP, dilakukan melalui penyelenggaraan diklat struktural, teknis, fungsional, dan prajabatan yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi dengan metode online/daring/blended menggunakan aplikasi e-milea.

3. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM

Kegiatan dukungan manajemen seperti pemenuhan dokumen internal sebesar 100%, satker yang lolos penilaian WBK, nilai rekon kinerja, pemenuhan MP, nilai IP ASN, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI, penyelesaian rekomendasi pengawasan, inovasi pelayanan publik dan penilaian mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP.

Tabel 7. Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024

NO.	KEGIATAN	PK APRIL
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	74.124.614.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	5.500.000.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	299.160.882.000
	JUMLAH	378.785.496.000

Sumber : Dok PK Puslat KP April 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2024 diatas, Pusat Pelatihan KP menetapkan target IKU untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berbasis Logical framework.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.

Target tersebut ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja utama untuk tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*). Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja Level 2 Pusat Pelatihan KP belum mengalami perubahan, pada bulan Januari 2024 Pusat Pelatihan KP memiliki 7 Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	35.173
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar)	13,416
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan KP (orang)	122
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.450
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	147
		7	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	5
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	8	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK)	4
		9	Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
		10	Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)	75
		11	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
5		12	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	6

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	13	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	5
6	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	5.165
		15	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga)	1
		16	Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	10
		17	Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	5
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100
		19	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		20	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai)	94
		21	Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		22	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	81
		23	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP (%)	≤0,5
		24	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)	82
		25	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP (Inovasi)	1
		26	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81

Sumber : Dokumen PK Pusat Pelatihan KP April 2024

Pengukuran Kinerja

A. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Ausguidline, 2005).

Selama ini pemanfaatan **Logical Framework Analysis** masih terbatas bertujuan untuk melakukan proses perencanaan proyek yang bersifat partisipatoris dan berorientasi tujuan. Teknik ini memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam suatu rencana/ program untuk menentukan prioritas dan rencana implementasi. Padahal *LFA* merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (*output*) dan dampak program (*outcome*) akan dimonitor dan dievaluasi dan penyajian ringkasan program dalam suatu format standard.

LFA digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajagan dalam penyusunan proposal, menyiapkan disain proyek/ program dalam suatu sistematis dan kaitan yang masuk akal, penilaian disain proyek/ program, memutuskan persetujuan untuk pelaksanaan proyek/ program, monitoring dan evaluasi kemajuan (*progress*) dan kinerja (*performance*) program.

LFA juga dapat digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan program, atau tepatnya kemampuan teknis, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan teknis dalam menyelenggarakan suatu program. Logical Framework sebagai kemampuan teknis program karena dapat digunakan sebagai

alat untuk Perencanaan, Penilaian, Monitoring dan Evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat.

Kerangka logika sebagai teknis dalam mengkombinasikan Logika Vertikal maupun Logika Horizontal. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus.

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matrix atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu: Hubungan antara *Goals*, *Objectives*, *Outputs* dan *Activities* Logika Vertikal dan Logika Horizontal Indikator Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program *Goals* dalam kerangka logis (*logframe*) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi diluar control program. *Objectives* atau sasaran program merupakan Rincian/ Bagian dari *Goal*, namun objectives atau sasaran ini selalunya diluar kontrol program. *Goal* dan *Objectives* diluar kontrol program karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang lainnya. Sedangkan *Outputs* itu sendiri adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program berakhir dan *Activities* adalah Kegiatan-kegiatan apa yang harus disusun untuk memperoleh *outputs*.

Dalam matriks logframe kita juga dapatkan istilah *Objectively Verifiable Indicators* atau disingkat OVI yaitu atau dalam bahasa Indonesia disebut indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan *SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realibility and Timely)*.

B. Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Indikator Kinerja, akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;

- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks Capaian IKU

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 100 – 120
Baik	Nilai 90 - <100
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat kurang	Nilai <50

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja berdasarkan Surat Tugas Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan nomor 42 Tahun 2024 tanggal 1 April 2024. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dari level 3 unit pelaksana teknis sampai ke level 2 pusat-pusat.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

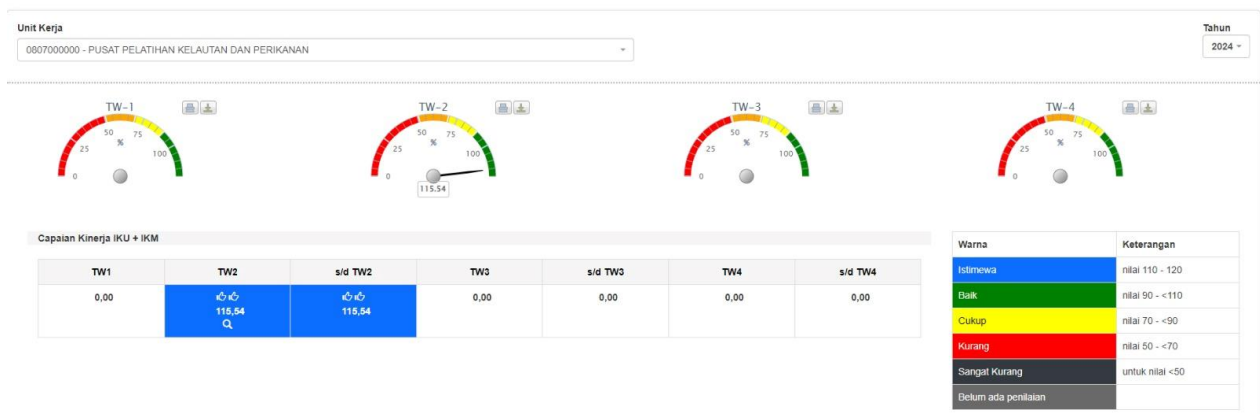


akuntabilitas kinerja

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Prestasi Kinerja Pusat Pelatihan KP

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP triwulan II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Pusat Pelatihan KP pada triwulan II tahun 2024 adalah **115,54% - ISTIMEWA** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Gambar 4. Tampilan Kinerjaku

Capaian keberhasilan untuk triwulan II tahun 2024 adalah istimewa, dengan capaiannya dalam beberapa IKU Utama sudah melebihi target yang ditetapkan.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan

tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis Pusat Pelatihan KP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Pendekatan Analisis Capaian Kinerja Organisasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 10. Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024 pada Pusat Pelatihan KP

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Target TW 2	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72			
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	35.173	21.126	26.228	120,00
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar)	13,416	5,94	10,13	120,00
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan KP (orang)	122			
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.450	428	666	120
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	147			
		7	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	5			

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Target TW 2	CAPAIAN	%
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	8	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK)	4			
		9	Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7			
		10	Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)	75			
		11	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12	8	9	112,5
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	6			
		13	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	5			
6	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	5.165	2.920	3.404	116,58
		15	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga)	1			
		16	Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	10			
		17	Lembaga / Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan	5			
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100	50	55	110,00
		19	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1			
		20	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai)	94			

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Target TW 2	CAPAIAN	%
		21	Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	94	111,80	118,94
		22	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	81	76	80,57	106,01
		23	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP (%)	≤0,5			
		24	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)	82	82	82	100.0
		25	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP (Inovasi)	1			
		26	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81			

Sasaran Program SK.01 - Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.01.01 - Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

DUDI adalah singkatan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dunia usaha berkaitan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan aspek-aspek dan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia industri berkaitan dengan segala pekerjaan untuk merancang, membuat, menghasilkan suatu produk.

Sampai triwulan II, Pusat Pelatihan KP melalui BPPP telah melatih 26.228 orang. Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri perlu dilakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrument evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

IK Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri ini tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 72%.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelatihan KP telah menyiapkan draft instrumen Monev yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama tim Sekretariat Badan. Instrumen yang dihasilkan

nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi purnawidya yang terserap di dunia usaha/industri

Indikator Kinerja IKSK.01.02 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (Orang)

IKU terkait Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan kelautan dan perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, dan BPPP Ambon.

IKU Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria yaitu :

- 1) Pelatihan berbasis APBN;
- 2) Peserta merupakan masyarakat (non ASN);
- 3) Penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan model Blended (kombinasi online dan tatap muka).

Tabel 11. Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
3.701	9.278	9.458	13.231	35.713	21.126	26.228	120,00	98,23%	35.713	73,44

Sumber : Data Capaian Puslat KP

Capaian IKU jumlah masyarakat yang dilatih pada triwulan II tahun 2024 sebesar 26.228 orang atau sebesar 120% dari target triwulan II. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 74,57%. Realisasi Triwulan 2 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 198,23% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Terhadap target Renstra Tahun 2024 capaian Triwulan 2 sebesar 73,44%. Berdasarkan target Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang dilatih pada masa periode Renstra 2020-2024 sebanyak 121.226 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 116.999 orang atau mencapai 96,51%. Adapun sebaran masyarakat KP yang dilatih per balai sebagai berikut ini:

Tabel 12. Masyarakat KP yang Dilatih Sesuai Satker

No	Balai	Target Tahunan	Target TW 2	Capaian TW 2	% TW 2
1	BPPP MEDAN	4.074	2.078	2.511	120,00
2	BPPP TEGAL	17.960	9.150	13.200	120,00
3	BPPP BANYUWANGI	6.736	5.500	5.765	104,82
4	BPPP BITUNG	3.101	2.292	2.646	115,45
5	BPPP AMBON	3.302	2.106	2.106	100,00
	Total	35.173	21.126	26.228	120,00

Sumber : Data Capaian Puslat KP

Dari data tersebut, terlihat bahwa semua balai telah mencapai atau bahkan melampaui target TW 2 nya. Balai dengan capaian tertinggi dalam TW 2 adalah BPPP Tegal dengan capaian 13.200 orang, mencapai 120% dari target. BPPP Medan dan BPPP Bitung juga menunjukkan capaian yang signifikan dengan masing-masing 120% dan 115,45% dari target. BPPP Ambon adalah satu-satunya balai yang mencapai tepat 100% dari target TW 2 untuk Iku Masyarakat KP yang dilatih ini.

Tabel 13. Masyarakat KP yang Dilatih Per Jenis Pelatihan

Bidang Pelatihan	BPPP Medan	BPPP Tegal	BPPP Banyuwangi	BPPP Bitung	BPPP Ambon	Grand Total
Budidaya Ikan	1.628	3.809	2.161	1.176	160	8.934
Penangkapan Ikan	783	4.164	568	24	1.114	6.653
Pengolahan & Pemasaran	100	4.184	2.774	764	332	8.154
Konservasi		661	262	200	500	1.623
Mesin Perikanan				382		382
SD Perikanan		382		100		482
Grand Total	2.511	13.200	5.765	2.646	2.106	26.228

Sumber : Data Capaian Puslat KP

Tabel diatas memuat data mengenai jumlah masyarakat yang dilatih dalam berbagai bidang pelatihan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di lingkup Pusat pelatihan KP. Dari data tersebut, terlihat bahwa pelatihan dalam bidang Budidaya Ikan, Pengolahan & Pemasaran, serta Penangkapan Ikan memiliki jumlah peserta yang signifikan. Pelatihan Budidaya ikan sebanyak 8.934 orang dari total 26.228 orang, selanjutnya pelatihan pengolahan dan pemasaran sebanyak 8.154 orang.

Selanjutnya pelatihan penangkapan ikan yang didalamnya termasuk untuk pelatihan awak kapal perikanan, perawatan alat tangkap sebanyak 6.653 orang. Pelatihan konservasi sebanyak 1.623 orang, dan Pelatihan pengelolaan sumberdaya perikanan sebanyak 482 orang, sementara paling sedikit adalah pelatihan mesin perikanan

sebanyak 382 orang. BPPP Tegal memiliki jumlah peserta terbanyak di hampir semua bidang pelatihan, menunjukkan kontribusi yang besar dalam pelatihan masyarakat KP. Semua Balai menyelenggarakan pelatihan terkait budidaya penangkapan ikan dan pengolahan dan pemasaran ikan. Sementara untuk pelatihan mesin perikanan hanya diselenggarakan oleh BPPP Bitung

Adapun faktor penyebab keberhasilan indikator kinerja Masyarakat KP yang dilatih triwulan II Tahun 2024 disebabkan oleh:

- 1) Adanya antusias peserta dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan kp.
- 2) Adanya Kerjasama dengan Dinas, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kp.
- 3) Tersedianya kurikulum/modul pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan Masyarakat.
- 4) Tersedianya sistem pelatihan dengan metode blended, dengan bantuan Penyuluh Perikanan di lapangan.
- 5) Tersedianya Instruktur/Widyaiswara yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pelatihan Masyarakat.
- 6) Balai Pelatihan di lingkup Pusat Pelatihan KP telah di approve program diklat awak kapal perikanan oleh Lembaga approval.
- 7) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta database penyelenggaraan pelatihan melalui SIMLAT KP sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Masyarakat KP yang Dilatih sebagai berikut:

- 1) Kerjasama KKP melalui Pusat Pelatihan KP dengan anggota DPR RI khususnya Komisi IV dilaksanakan lebih awal dibanding biasanya, sebagian besar telah dilaksanakan di triwulan 1.
- 2) BLU BPPP Tegal terus melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan pemda, NGO, Perusahaan, lembaga swasta lainnya dalam menjaring peserta pelatihan.
- 3) Melakukan koordinasi perencanaan jadwal pelaksanaan pelatihan dengan Balai Pelatihan.
- 4) Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai kegiatan pelatihan yang akan dilakukan

Indikator Kinerja IKSK.01.03 - Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar)

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak

(PNBP). Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. PNBP yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan KP adalah dengan kegiatan Pelatihan, dan Sarana Prasarana Gedung dan Worskhop.

Tabel 14. Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
		2,15	4,36	13,42	5,94	10,13	120,00	132,34%	13,42	75,51

Sumber : Data Capaian Puslat KP

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP pada Triwulan 2 Tahun 2024 sebesar Rp.10.131.477.685,-. Atau 120% dari target Triwulan 2 sebesar Rp5.940.000.000,-. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp13.415.665.000,-. maka realisasi mencapai 75,51%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 2 pada tahun 2023 sebesar Rp4.360.000.000,- ada kenaikan sebesar 232,34% dari Tahun 2023. Berdasarkan target kumulatif nilai PNBP Satker lingkup Pusat Pelatihan KP pada Renstra 2020-2024 sebesar 27,18 Milyar Rupiah, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 29,56 Milyar Rupiah (108,75%).

Tabel 15. Rekap IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP

No	Level 2	Target Tahunan (Rp)	Target TW 2 (Rp)	Capaian TW 2 (Rp)	% TW 2
1	BPPP MEDAN	380.000.000	290.000.000	371.290.644	120
2	BPPP TEGAL	10.530.206.000	4.620.000.000	7.842.437.438	120
3	BPPP BANYUWANGI	770.875.000	600.000.000	942.140.585	120
4	BPPP BITUNG	188.600.000	130.000.000	256.992.419	120
5	BPPP AMBON	681.984.000	80.000.000	291.912.422	120
6	BDA SUKAMANDI	864.000.000	220.000.000	426.704.177	120
Total		13.415.665.000	5.940.000.000,00	10.131.477.685	120

Tabel ini memuat data mengenai target tahunan, target triwulan kedua (TW 2), capaian TW 2, dan persentase capaian TW 2 untuk Satuan Kerja (Satker) di lingkup Pusat Pelatihan KP. Total Target Tahunan PNBP di lingkup Pusat pelatihan KP sebanyak

Rp13,415,665,000,- pada triwulan 2 ini targetnya adalah Rp5,940,000,000,-. Realisasi Total Capaian TW 2 ini sebanyak Rp10,131,477,685 atau mencapai 120%. Dari data tersebut, terlihat bahwa semua Satker telah mencapai 120% dari target TW 2 nya, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai target PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). BPPP Tegal memiliki nilai target tahunan dan capaian TW 2 tertinggi di antara semua Satker, diikuti oleh BPPP Medan dan BPPP Banyuwangi. Adapun faktor penyebab keberhasilan PNB pada triwulan II Tahun 2024 disebabkan oleh:

- 1) Sarana dan Prasarana di Balai Pelatihan dan Penyuluhan yang cukup memadai sehingga menarik minat pengguna jasa untuk menggunakan layanan sebagai sumber pemasukan PNB;
- 2) Adanya komitmen Pimpinan dalam meningkatkan PNB.
- 3) Tersedianya standar biaya/tarif atas PNB yang berlaku.
- 4) Optimalisasi workshop pelatihan dengan KPKNL atau instansi lainnya.

Kegiatan pendukung capaian Indikator PNB lingkup Pusat Pelatihan KP adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dengan Perusahaan penangkapan ikan, sekolah sekolah perikanan, lembaga NGO dalam perekrutan peserta pelatihan sehingga ada pemasukan PNB;
- 2) Identifikasi sumber sumber PNB lainnya di balai dan BLU;
- 3) Peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana dan promosi di media sosial

Indikator Kinerja IKSK.01.04 Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Puslat KP (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di Bidang Pelatihan kelautan dan Perikanan diantaranya Tenaga Kerja di P2MKP. IK Tenaga kerja yang terlibat di lingkup Puslat KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024.

IK Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Puslat KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 122 Orang.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi daftar P2MKP yang masih aktif sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan terkait SK Penetapan ataupun klasifikasi P2MKP.

Sasaran Program SK.02 - Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.02.01 - SDM KP yang bersertifikat kompetensi (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Sebagai upaya pengakuan dan perlindungan atas kompetensi yang dimiliki oleh SDM KP, khususnya tenaga kerja sektor KP, maka Pusat Pelatihan KP melalui Balai Diklat pada tahun 2024 telah menetapkan target untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi SDM KP sebanyak 1.450 orang, Indikator kinerja utama untuk Sasaran Strategis ini adalah SDM KP yang bersertifikat kompetensi sebanyak 1.450 orang, yang dihasilkan oleh 5 (lima) BPPP.

BPPSDM sebagai bagian penting dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP, sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab atas pencapaian IKU tersebut, dengan indikator yang hendak dicapai adalah jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diberi kewenangan melaksanakan Uji Kompetensi dibawah dan dibentuk oleh BNSP dan lembaga diklat yang merupakan approval untuk melakukan diklat kepelautan internasional dengan mengacu pada standar SKKNI, SK3, dan IMO Course.

Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP melalui kegiatan sertifikat kompetensi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang sesuai tugas/jabatan yang dimiliki sesuai standar kompetensi yang berisi rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, sertifikasi kompetensi ini juga memberikan manfaat kepada perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan remunerasi sesuai dengan level kompetensi yang dimiliki.

Tabel 16. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
97	131	403	632	1.450	428	666	120,00	5,38	1.450	45,93

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang diuji kompetensinya. Penghitungan dilakukan dengan cara penjumlahan dari SDM KP yang mengikuti sertifikasi kompetensi baik purnawidya pelatihan maupun dari dunia usaha, dan dunia industri. Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada triwulan II tahun 2024 sebesar 666 orang atau sebesar 120% dari target triwulan II. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 45,93%. Realisasi Triwulan 2 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,38% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Berdasarkan target SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada periode Renstra 2020-2024 sebanyak 4.308 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 3.593 orang atau mencapai 83,4%. Adapun rekap sertifikasi kompetensi per Satker sebagaimana tabel berikut. Untuk triwulan II ini baru BPPP Tegal dan BPPP Banyuwangi yang memiliki realisasi, sedangkan satker lainnya masih dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi ini.

Tabel 17. Rekap Sertifikasi Kompetensi per Satker

No	Balai	Target Tahunan	Target TW 2	Capaian TW 2	% TW 2
1	BPPP MEDAN	150	-	-	
2	BPPP TEGAL	730	398	612	120,00
3	BPPP BANYUWANGI	270	30	54	120,00
4	BPPP BITUNG	150		-	
5	BPPP AMBON	150		-	
	Total	1.450	428	666	120,00

Berdasarkan bidang kompetensinya realisasi pada triwulan II ini Budidaya sebanyak 85 orang, Perikanan Tangkap sebanyak 540 orang dan Manajemen sebanyak 41 orang. Sertifikasi Perikanan Tangkap ini sebagian besar merupakan sertifikasi untuk awak kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dari DJPT ataupun dari BPPSDM pasca pelimpahan kewenangan terkait sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.

Tabel 18. Rekap IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi perbidang usaha

No	Jenis LSP	Kompetensi				Jumlah
		Budidaya	Pengolahan	Perikanan Tangkap	Permesinan	
1	BPPP Medan					0
2	BPPP Tegal	55		516		41
3	BPPP Banyuwangi	30		24		54
4	BPPP Bitung					0
5	BPPP Ambon					0
Jumlah		85	0	540	0	41

Adapun faktor penyebab keberhasilan IKU SDM KP yang bersertifikasi kompetensi pada triwulan II Tahun 2024 disebabkan oleh:

- 1) Telah adanya approval assesor pelaksanaan uji kompetensi oleh BNSP yang diwakili oleh LSP KP;
- 2) Permen KKP No.33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, adapun dalam Permen KKP ini untuk Sertifikat Awak Kapal Perikanan wewenang Dirjen Tangkap KKP pada Pasal 127 ayat 2-4 sudah mulai diterapkan;
- 3) Sistem ujian awak kapal perikanan telah dibuat dan terus disempurnakan bersama DJPT dan Pusdatin;

Kegiatan pendukung capaian IKU SDM KP yang bersertifikasi kompetensi pada triwulan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dengan BNSP dalam kegiatan uji sertifikasi, Memperpanjang akreditasi balai pelatihan sebagai tempat TUK;
- 2) Percepatan penerbitan sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan oleh Pusat Pelatihan KP;
- 3) Melakukan pendampingan proses approval Program Diklat Awak Kapal Perikanan khususnya di Balai Pelatihan KKP.

Sasaran Program SK.03 - Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Indikator Kinerja IKSK.03.01 - Lulusan pelatihan yang membentuk start up (Orang)

Startup adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Saat ini, istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Pusat Pelatihan KP mendefinisikan IKU startup sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan

memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital).

Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih.

Pusat Pelatihan KP bersama Balai Pelatihan juga melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait manual Iku dari indikator kinerja Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan). Reviu terhadap hasil capaian IKU tahun 2024 serta sharing dan berbagi pengalaman antar balai. Selanjutnya akan dilakukan identifikasi terhadap lulusan pelatihan yang berpotensi untuk dijadikan startup berdasarkan profil usahanya dengan bantuan penyuluh perikanan di lapangan.

IK Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 147 Orang.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat perencanaan pembuatan konten terkait digitalisasi pemasaran produk kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja IKSK.03.02 - Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (Paket)

Salah satu Penyelenggaraan fungsi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan upaya menjadikan sumberdaya manusia aparatur dan non aparatur sektor kelautan dan perikanan dapat berperan nyata dalam pembangunan nasional. Untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, salah satu strategi yang ditempuh adalah secara terus menerus meningkatkan profesionalisme para pelatih.

Kebijakan penyelenggaraan pelatihan kp yang ditetapkan adalah diterapkannya kurikulum berdasarkan kompetensi kerja dimana pelaksanaan proses berlatih dan melatih dengan menggunakan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GGBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan mutu hasil pelatihan yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta sikap para peserta yang lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah tersedianya pelatih yang profesional, yakni pelatih yang menguasai dan mampu melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna.

Untuk meningkatkan serta mendorong tumbuhnya sikap lebih percaya diri para pelatih dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, maka setiap pelatih di Lembaga Pelatihan perlu melaksanakan kajiwidya sesuai dengan materi yang dilatihkan. Kajiwidya adalah kegiatan pelatih untuk belajar atau berlatih sendiri, melakukan, mengamati dan menganalisis suatu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja pelatih sesuai dengan substansi mata diklat. Pelatih lembaga pelatihan terdiri dari widyaiswara, instruktur, dan widyaiswara/instruktur luar biasa.

Tahun 2024 terjadi perubahan mekanisme pelaksanaan Kajiwidya, mulai tahun ini akan dilakukan seleksi proposal dan proposal yang dianggap sesuai dan layak yang akan dibiayai untuk dilaksanakan. Pusat Pelatihan KP telah Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kaji widya ini, dan sudah dilakukan sosialisasi kepada BPPP dan instrukturinya. IK Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 5 Paket.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian dan penerimaan proposal kaji widya dari Balai Pelatihan ke Puslat KP.
- 2) Pendampingan proses seleksi proposal kaji widya.
- 3) Pemaparan dari masing-masing pengusul proposal Kajiwidya
- 4) Seleksi pemilihan proposal mana yang akan lanjut untuk dipaparkan kepada Kepala BPPSDM KP

Sasaran Program SK.04 - Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP

Indikator Kinerja IKSK.04.01 - Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang disusun (NSPK)

Ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten perlu diimbangi dengan tersedianya regulasi yang baik, sehingga dapat menjadi standar advokasi dalam mencermati kendala dan permasalahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan bahan yang komprehensif serta input yang terintegrasi melalui pentahapan proses pembahasan dan penyelesaiannya khususnya dalam memberikan dasar yang kuat untuk melakukan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan kelautan dan

perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan terhadap pengurangan pengentasan kemiskinan.

Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait standarisasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan yang akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian. Selain itu Sertifikasi kompetensi kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun Regulasi/Panduan/Pedoman/NSPK dan Administrasi terkait Sertifikasi kompetensi atau tenaga kerja yang telah atau tenaga kerja yang berpengalaman. Selain itu aturan dan pedoman untuk penyusunan Modul dan kurikulum pelatihan aparatur dan pelatihan Masyarakat KP.

Telah dilakukan rapat-rapat penyusunan draft atas peraturan yang akan dihasilkan pada tahun ini. Rapat penyusunan dilakukan internal di lingkup Pusat Pelatihan KP ataupun melibatkan stakeholder lain untuk mendapatkan masukan atas draft yang disusun.

IK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang disusun tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 4 NSPK.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) Harmonisasi KKNi dengan Setneg.
- 2) Pembahasan revisi PermenKP 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- 3) Pembahasan revisi PermenKP 33 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik bersama DJPT.
- 4) Pembahasan PermenKP tentang P2MKP yang direncanakan akan dilakukan secara bilateral dengan Kemnaker.

Indikator Kinerja IKS.04.02 - Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)

Indikator Kinerja Utama ini didefinisikan sebagai indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan yang terstandar di bawah BPPSDM yang masih berlangsung. Lembaga pelatihan seperti akreditasi ISO dan pemeliharaan sistem mutu pelatihan.

Lembaga pelatihan yang terstandar merupakan langkah strategis dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan layanan pelatihan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan standarisasi seluruh proses penyelenggaraan pelatihan, meliputi

standardisasi: program, lulusan, evaluasi, biaya, proses, ketenagaan, serta standardisasi sarana dan prasarana pelatihan KP.

Dengan sistem manajemen mutu (QMS) yang efektif ini, maka Balai memiliki akan struktur yang lebih jelas, pendekatan sistematis untuk meningkatkan layanan kepada setiap peserta latih, serta membantu untuk pengendalian dan proses pencapaian tujuan organisasi. Dengan akreditasi QMS ini juga akan memberikan manfaat kepada Balai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi tingkat kesalahan yang mengarah pada peningkatan produktivitas Balai.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan KP sejak tahun 2017 telah terakreditasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Dimana terdapat 7 karakteristik utama yaitu; pendekatan pro aktif, integrasi mutu ke dalam proses bisnis, performance, mengikuti siklus PDCA, penyesuaian lingkup dengan komitmen organisasi, bersifat sukarela, dan relevan dengan tugas dan fungsi Balai. Dengan akreditasi ini telah memberikan manfaat nyata kepada balai dalam peningkatan kepuasan layanan kepada peserta latih, seperti pembuatan Pelayanan Pelatihan Terpadu satu Pintu (PTSP) di beberapa balai, pengurangan biaya pelatihan tanpa mengurangi mutu penyelenggaraan pelatihan dan mutu lulusan pelatihan, serta mampu mengurangi permasalahan atau sengketa antara bagian dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi.

IK Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai standar lembaga pelatihan tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 6 Lembaga.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan awareness kepada tim yang ada di Pusat Pelatihan KP serta UPT Lingkup Pusat Pelatihan KP dalam rangka peningkatan pemahaman terkait sistem manajemen mutu (QMS).
- 2) Audit lapangan ke Pusat pelatihan KP dan Balai untuk penilaian ISO Pusat Pelatihan KP dan BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Bitung, BPPP Ambon dan BDA Sukamandi. Audit ini dilaksanakan oleh TUV Reinland selaku instansi yang akan mengeluarkan sertifikat penjamin mutu di lingkup Pusat pelatihan KP.

Indikator Kinerja IKSK.04.03 - Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)

IKU ini didefinisikan indikator yang menunjukkan jumlah Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan, adapun sertifikasi dilakukan oleh

Lembaga Approval Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMKP. Formula Perhitungan IKU ini yakni jumlah sertifikasi program diklat masyarakat bidang teknis kelautan dan perikanan. Bukti dukung dari IKU ini antara lain sertifikat approval Program Diklat Masyarakat Teknis Bidang Kepelautan dan Perikanan yang telah disahkan oleh pimpinan.

IK Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 75%.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan SK Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP tentang Komite Approval Program Diklat Awak Kapal Perikanan;
- 2) Identifikasi Lembaga Diklat yang mengusulkan approval Lembaga diklat awak Kapal Perikanan;
- 3) Rapat rapat koordinasi dengan LAN untuk pembentukan Lembaga Pengakreditasi Program Diklat Teknis Kelautan dan Perikanan;

Indikator Kinerja IKSK.04.04 - Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah jejaring dan atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pusat Pelatihan maupun UPT Pelatihan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati terkait kegiatan pelatihan dengan instansi/institusi lain yang telah disepakati dalam bentuk Kepmen, SK, MOU, dan atau KAK yang sudah di tandatangani. IKU dari sasaran strategis terselenggaranya kegiatan pelatihan KP yang mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan ini menggambarkan inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Pusat Pelatihan KP yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sebagai upaya lanjutan dari output yang telah dihasilkan untuk menjadi *input* pada proses selanjutnya.

Pada triwulan II tahun 2024 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Pusat Pelatihan KP sudah ada capaian 9 PKS dengan target triwulan II sebanyak 8 PKS (112,50%) dari target tahunan sebanyak 12 PKS (75%). Realisasi triwulan II tahun 2023 sebesar 10 kerjasama sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2023 adanya penurunan sebesar 10%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan IK Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti triwulan II Tahun 2024 disebabkan oleh::

- 1) Kerjasama dengan Intansi terkait lainnya, Pemerintah daerah dan NGO pada awal tahun ;
- 2) Pemenuhan SDM Tenaga Pelatih;
- 3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelatihan.
- 4) Adanya kepentingan dan atau tujuan yang sama dengan organisasi lain.

Kegiatan pendukung capaian IK Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan pihak terkait yang berpotensi dan kepentingan untuk dilakukan Kerjasama dalam upaya peningkatan peran pelatihan KP serta memperluas jangkauan pelayanan kepada Masyarakat. Selain itu juga terus dilakukan koordinasi untuk tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani PKS nya, seperti dengan BNSP, Kemenaker, Perlaut, LSP KP, dan JICA.

Tabel 19. Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti.

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
2	11	7	10	12	8	9	112,50	-10,00%	12	75,00

Tabel 20. Rekap Capaian IKU Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP

No	KERJASAMA	Judul Kerjasama	Nomor perjanjian kerjasama	JANGKA WAKTU	
				MULAI	BERAKHIR
1	BPPSDM dengan BNSP	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Sumbidaya manusia Kelautan dan perikanan	2/BPPSDM?KKP/KB/II/2024	20 Februari 2024	20 Februari 2027
2	BPPP Tegal dengan Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I)	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan Bagi awak kapal Perikanan	22/BPPSDM/KKP/PKS/III/2024	15 Maret 2024	15 Maret 2027
3	BPPP Tegal dengan Jejaring Laboratorium Pengujian Penyakit dan Mutu Keamanan hasil Perikanan (JLPPMHP) Jawa Timur	Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi	/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024	16 Februari 2024	16 Februari 2027
4	BPPP Tegal dengan CV, Waluyo Dokpel Indonesia	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan Bagi Calon Awak kapal Perikanan	12/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024	29 Februari 2024	29 Februari 2027

5	BPPP Tegal dengan Tiga Diva Sinergi Bersama	Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi	21/BPPSDM/KKP/PKS/III/2024	15 Maret 2024	15 Maret 2027
6	BPPP Tegal dengan PT Jasuma Anugerah Prima Sejahtera	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan bagi Awak Kapal Perikanan	30/BPPSDM/KKP/PKS/VI/2024	15 Juni 2024	15 Juni 2027
7	Balai Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan BPPP Tegal	Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Berstandar Industri	22/BPPSDM/KKP/PKS/II/2024	20 Februari 2024	20 Februari 2027
8	BPPP Tegal dengan Koperasi Mitra Nelayan Samudra	Peningkatan Kompetensi Bidang Kepelautan bagi Nakhoda Kapal Perikanan	28/BPPSDM/KKP/PKS/VII/2024	2 Juni 2024	2 Juni 2027
9	BPPP Tegal dengan PT Citra Mutiara Abadi	Penggunaan Kapal Bawal Putih III	B. 3767/BPPP.TGL/PL.450/VI/2024	10 Juni 2024	9 Juli 2024

Sasaran Program SK.05 - Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja IKSK.05.01 - Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan sarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal.

IK Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 6 Unit.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) BPPP Medan telah selesai pengadaan kendaraan operasional roda 4;
- 2) BPPP Tegal dalam proses pengadaan sarana layanan pelatihan.
- 3) BPPP Banyuwangi Progress pengadaan perlengkapan pendukung pelatihan dan pengadaan peralatan workshop kepelautan.
- 4) BPPP Bitung telah selesai pengadaan AC dan meubelir dan sementara proses pengadaan peralatan mesin pendukung layanan publik.

- 5) BPPP Ambon sudah selesai pengadaan sarana pendingin ruangan dan perkantoran, sarana pelayanan publik dan sarana workshop budidaya.

Indikator Kinerja IKSK.05.02 - Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)

Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. Perhitungan pada Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan cara menjumlahkan prasarana yang terbentuk pengadaan fisik/belanja modal. IK Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024.

IK Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebanyak 5 Unit.

Progress kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II ini adalah sebagai berikut::

- 1) BPPP Medan telah selesai pengadaan renovasi gedung PTSP;
- 2) BPPP Banyuwangi Progress pengadaan renovasi asrama pelatihan.
- 3) BPPP Ambon telah selesai renovasi kantor induk.

Sasaran Program SK.06 - Aparatur KP yang Dididik dan dilatih

Indikator Kinerja IKSK.06.01 - Aparatur KP yang dilatih (Orang)

IKU untuk Sasaran Strategis terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP ini adalah Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh BDA Sukamandi, maupun oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan memiliki peran strategis dalam pencapaian IKU tersebut.

Target kinerja triwulan II tahun 2024 ini sebanyak 2.920 orang, dan realisasi mencapai 3.404 orang (116,58%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 5.165, realisasi sudah mencapai 65,91%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 2 tahun 2023 sebanyak 3.801 orang maka terjadi penurunan sebanyak 10,44%. Apabila melihat target Renstra 2020-2024 kumulatif sebesar 22.690 orang, sampai triwulan II tahun 2024 ini sudah tercapai sebanyak 28.312 orang atau 124,77%.

Tabel 21. Capaian IKU Aparatur KP yang dilatih

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
5.010	721	1.720	3.801	5.165	2.920	3.404	116,58	-10,44%	5.165	65,91

Adapun faktor penyebab keberhasilan IKU Aparatur KP yang dilatih pada triwulan II Tahun 2024 disebabkan oleh:

1. Pelatihan melalui aplikasi aplikasi e-milea sehingga bisa online ke semua ASN KKP
2. Eselon I Teknis pada awal tahun sudah berkoordinasi dengan BDA Sukamandi mengenai Diklat Teknis yang akan dilaksanakan
3. Tersedianya sarana pokok dan penunjang penyelenggaraan diklat,
4. Widyaiswara yang telah memiliki sertifikat ToT sesuai bidang diklat yang dilatihkan, dan tersedianya perangkat kurikulum dan modul pelatihan, serta telah terakreditasinya program diklat kepemimpinan tingkat III dan IV, serta diklat prajabatan di BDA Sukamandi oleh LAN-RI.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kompetensi ASN KP yakni pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pelatihan Pra-Jabatan maupun pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, seperti Diklat Struktural, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial dengan melakukan kerjasama dan sinkronisasi dengan Eselon 1 KKP dalam Identifikasi kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan.

Indikator Kinerja IKSK.06.02 - Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga)

IKU Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Akreditasi Program Diklat Aparatur dan Lembaga Diklat Bidang Kelautan dan Perikanan dimana proses akreditasi dilakukan oleh Lembaga Approval Lembaga Diklat yang berwenang seperti LAN. Formula penghitungan IKU ini yakni berdasarkan umlah Akreditasi Lembaga Diklat bagi ASN dan bukti dukung berupa Sertifikat Approval Lembaga dan atau Program Diklat ASN (Teknis, Manajerial dan Sosio Kultural) Bidang Bidang Kepelautan dan Perikanan yang telah disahkan oleh pimpinan. IK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 1 Lembaga.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan penilaian untuk Akreditasi Program Diklat Pelatihan Kepemimpinan Adminnistrator (PKA) yang merupakan program pengembangan

kompetensi yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kompetensi kepemimpinan kinerja, untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan jabatan administrator;

- 2) Telah dilaksanakan penilaian untuk Akreditasi Program Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) yang merupakan pelatihan struktural kepemimpinan bagi Pejabat Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.

Indikator Kinerja IKSK.06.03 - Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)

IKU ini didefinisikan sebagai indikator untuk menunjukkan implementasi Penyelenggaraan Fungsi Corporate University Kementerian KP. Formula perhitungan dari IKU ini yakni % Jumlah Laporan Penyelenggaraan fungsi Corporate University KKP di lingkup KKP dengan bukti dukung berupa dokumen laporan implementasi penyelenggaraan fungsi Corporate University Kementerian KP yang telah disahkan oleh pimpinan.

IK Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 10%.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Telah diusulkan izin Prakarsa Rancangan Keputusan Menteri tentang *Corporate University* Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Kepala BPPSDM KP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan KP;
- 2) Rapat koordinasi dengan PRL terkait penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelatihan klasikal dan non klasikal.

Indikator Kinerja IKSK.06.04 - Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)

IKU ini didefinisikan sebagai indikator untuk menunjukkan terkait Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan. Lembaga yang dimaksud merupakan lembaga pemerintah/swasta diluar unit Kerja Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Formula perhitungan Iku ini yakni jumlah Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan. Bukti dukung IK ini berupa rekapitulasi data Lembaga/Instansi

yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan.

IK Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 5 Lembaga. Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah mengidentifikasi Lembaga/instansi diluar KKP (baik Kementerian Lembaga Lain maupun Pemerintah Daerah) yang memanfaatkan e-milea untuk mengikuti pelatihan teknis kelautan dan perikanan, maupun pelatihan-pelatihan lain yang berbayar atau menghasilkan PNPB.

Sasaran Program SK.07 - Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja IKSK.07.01 - Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP

(%)

Indikator Kinerja ini merupakan Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran. Formula indikator kinerja ini A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan. B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di tandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan. C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain. Presentase dokumen layanan manajemen yang tersedia / dibandingkan total dokumen layanan manajemen yang ditargetkan.

Capaian TW II Tahun 2024 sebesar 55% dari target Triwulan 2 sebesar 50%. dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan sedikit dari realisasi capaian sebesar 27,96%.

Tabel 22. Capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024

	56,52	48,97	54	100	50	55	110,00	1,85	100	55,00
--	-------	-------	----	-----	----	----	--------	------	-----	-------

Untuk bukti capaian IKU ini diperoleh Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker antara lain Dokumen Perencanaan Anggaran 2025, dokumen revisi perencanaan anggaran 2024, dokumen perencanaan kinerja, dokumen reuiu renstra, dokumen laporan kinerja, dokumen laporan SPIP, dokumen realisasi anggaran, dokumen laporan PNBPN, dokumen weekly report, laporan keuangan, laporan BMN, laporan PM SAKIP, dan laporan PIPK Tahun 2024.

Tabel 23. Rekap Dokumen Dukungan Manajemen Internal Pusat Pelatihan KP

No.	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan II)
1	Dokumen Perencanaan Anggaran 2025			
	1) Dokumen Ranwal 2025	Tahunan	1	1
	2) Dokumen Renja Indikatif 2025	Tahunan	1	1
3	Dokumen Renja Definitif 2025	Tahunan	1	
	Dokumen Revisi Perencanaan Anggaran 2024			
	1) Dokumen Revisi Anggaran 2024	Tahunan	1	1
3	Dokumen Perencanaan Kinerja			
	1) Perjanjian Kinerja	Tahunan	1	1
	2) Rencana Aksi	Tahunan	1	1
	3) Rincian Target IKU	Tahunan	1	1
	4) Manual IKU	Tahunan	1	1
5	Dokumen Revisi Renstra	Tahunan	1	1
	Dokumen Laporan Kinerja			
	1) LKj Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan	1	1
	2) LKj Triwulan I Tahun 2024	Triwulan	1	1
	3) LKj Triwulan II Tahun 2024	Triwulan	1	
6	Dokumen Laporan SPIP	Mingguan		
	4) LKj Triwulan III Tahun 2024	Triwulan	1	
	1) Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023	Triwulan	1	1
	2) Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024	Triwulan	1	1
	3) Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024	Triwulan	1	
7	Dokumen Realisasi Anggaran	Bulanan		
	4) Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024	Triwulan	1	
7	Dokumen Realisasi Anggaran	Bulanan		
	1) Realisasi Anggaran Bulan Januari	Bulanan	1	1

No.	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan II)	
	2)	Realisasi Anggaran Bulan Februari	Bulanan	1	1
	3)	Realisasi Anggaran Bulan Maret	Bulanan	1	1
	4)	Realisasi Anggaran Bulan April	Bulanan	1	1
	5)	Realisasi Anggaran Bulan Mei	Bulanan	1	1
	6)	Realisasi Anggaran Bulan Juni	Bulanan	1	1
	7)	Realisasi Anggaran Bulan Juli	Bulanan	1	
	8)	Realisasi Anggaran Bulan Agustus	Bulanan	1	
	9)	Realisasi Anggaran Bulan September	Bulanan	1	
	10)	Realisasi Anggaran Bulan Oktober	Bulanan	1	
	11)	Realisasi Anggaran Bulan November	Bulanan	1	
	12)	Realisasi Anggaran Bulan Desember	Bulanan	1	
8	Dokumen Laporan PNBP		Bulanan		
	1)	Bulan Januari	Bulanan	1	1
	2)	Bulan Februari	Bulanan	1	1
	3)	Bulan Maret	Bulanan	1	1
	4)	Bulan April	Bulanan	1	1
	5)	Bulan Mei	Bulanan	1	1
	6)	Bulan Juni	Bulanan	1	1
	7)	Bulan Juli	Bulanan	1	
	8)	Bulan Agustus	Bulanan	1	
	9)	Bulan September	Bulanan	1	
	10)	Bulan Oktober	Bulanan	1	
	11)	Bulan November	Bulanan	1	
	12)	Bulan Desember	Bulanan	1	
9	Dokumen Weekly Report		Mingguan		
	1)	Bulan Januari	Mingguan	1	1
	2)	Bulan Februari	Mingguan	1	1
	3)	Bulan Maret	Mingguan	1	1
	4)	Bulan April	Mingguan	1	1
	5)	Bulan Mei	Mingguan	1	1
	6)	Bulan Juni	Mingguan	1	1
	7)	Bulan Juli	Mingguan	1	
	8)	Bulan Agustus	Mingguan	1	
	9)	Bulan September	Mingguan	1	
	10)	Bulan Oktober	Mingguan	1	
	11)	Bulan November	Mingguan	1	
	12)	Bulan Desember	Mingguan	1	
10	Laporan Keuangan		Semester		
	1)	Semester II Tahun 2023	Semester	1	1

No.	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan II)
	2)	Semester I Tahun 2024	Semester	1
11	Laporan BMN	Semester		
	1)	Data BMN Puslat Semester II Tahun 2023	Semester	1
	2)	Data BMN Puslat Semester I Tahun 2024	Semester	1
12	Laporan PM SAKIP	Tahunan	1	
13	Laporan PIPK Tahun 2024	Tahunan	1	
		Jumlah	60	33
		%	100	55,00

Faktor Keberhasilan kegiatan ini yaitu adanya koordinasi internal yang baik antar tim kerja Pusat Pelatihan KP terutama dalam penyediaan dokumen-dokumen dukungan manajemen instansi yang tepat waktu.

Kegiatan pendukung capaian IKU Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP pada triwulan II ini adalah sebagai berikut

- 1) Monitoring pemenuhan dokumen bulanan, triwulanan dan semesteran.
- 2) Komitmen pegawai dan pimpinan dalam pemenuhan output dokumen untuk capaian IKU ini.

Indikator Kinerja IKSK.07.02 - Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan

Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perijinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas maka diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Revisi Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Pusat Pelatihan KP dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan pada akhir periode pengukuran.

IK Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 1 Satker.

Pada triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan pendampingan oleh Inspektorat Jenderal I KKP dalam hal pemenuhan dokumendokumen yang diperlukan untuk lolos dalam penilaian WBK. Hasil dari pendampingan tersebut telah diperoleh nilai sementara 81,23% namun masih ada area yang belum mencapai 60%. Masing-masing area perubahan sedang menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan. Penilaian internal KKP direncanakan pada Bulan Agustus Tahun 2024.

Indikator Kinerja IKSK.07.03 - Niai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai)

IKU Nilai rekonsiliasi kinerja Pusat Pelatihan KP merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IK Niai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 94 (Nilai).

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024
- 2) Penyiapan Dokumen capaian realisasi kinerja Tahun 2024
- 3) Sinkronisasi Dokumen perencanaan dan realisasi kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Indikator Kinerja IKSK.07.04 - Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Formula perhitungan IKU ini menggunakan aplikasi cofis (Collaboration Office Portal.kkp.go.id) dengan penghitungan keaktifan dilakukan setiap satu triwulan dengan nilai 3 poin dan nilai maksimal 4 poin. Cara pengukuran dengan melihat jumlah post dan untuk triwulan II hasil capaiannya merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I dan II.

Capaian dihitung dengan rumus:

Pemenuhan Dokumen :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$

Keaktifan :

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 80\%$$

Gambar 5. Formula perhitungan MP (Sumber : Dok Manual IKU)

Capaian IK Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Pada triwulan II ini yakni 111,80% dari target triwulan II sebesar 94% (118,94%). Capaian triwulan II tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian di triwulan II tahun 2023 (100%). Di triwulan I tahun 2024 IK ini mengalami

perubahan yakni perbedaan aplikasi yang dipergunakan oleh user yang sebelumnya menggunakan aplikasi Bitrix24.kkp menjadi aplikasi cofis.kkp.

Tabel 24. Capaian IKU Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang tersandar

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	100,00	50,00	100	94	94	111,80	118,94	111,80	94	118,94

Adapun faktor penyebab keberhasilan indikator kinerja Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan II Tahun 2024 disebabkan oleh terpenuhinya variabel-variabel terhadap penilaian MP oleh pejabat pelaksana dengan kontribusi pengetahuan berupa informasi, infografis dan video di platform yang telah tersedia.

Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar antara lain yakni sosialisasi secara berjenjang terhadap penggunaan portal cofish sebagai platform Manajemen Pengetahuan dan komitmen pimpinan dan para pejabat pelaksana terhadap pemenuhan capaian IK ini.

Indikator Kinerja IKSK.07.05 - Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN secara definisi adalah adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IP ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi (a) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), (b) Pendidikan S-2 (Strata-Dua), (c) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat), (d) Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda), (e) Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan (f) Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut:

Tabel 25. Bobot Komponen Kualifikasi Perhitungan MP

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Tabel 26. Bobot Komponen Kompetensi Perhitungan MP

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15		
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15		
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0		
	Diklat Fungsional		15	
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam Tahun Terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel 27. Bobot Komponen Kinerja Perhitungan MP

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 - keatas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d dibawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel 28. Bobot Komponen Disiplin Perhitungan MP

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan (1) Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsiak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; (2) Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; (3) Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; (4) Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
- d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 %

(lima persen). Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut :

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPLev 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPLev 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPLev 2}$$

Gambar 6. Rumus Perhitungan IP ASN (Sumber : Manual IKU)

Adapun kategori penilaian IP ASN yakni:

Tabel 29. Kategori Nilai IP ASN

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 - 90	Cenderung profesional/tinggi
71 - 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 - 70	Cenderung tidak profesional/rendah
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP ini diukur di Triwulan II dan triwulan IV. Di Triwulan II, berdasarkan surat Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor B.5448/BPPSDM.1/TU.210/VII/2024, capaian IP ASN Puslat KP sebesar 80,57 dari target triwulan II sebesar 76 (106,01). Adapun untuk capaian triwulan II tahun 2024 dibandingkan triwulan II tahun 2023 sebesar 78,19 menunjukkan adanya peningkatan. Capaian triwulan II dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 81 masih kurang 0,43%.

Tabel 30. Capaian IKU IP ASN Lingkup Puslat KP

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	58,62	73,13	78,19	81	76	80,57	106,01	3,04	81	99,47

Adapun faktor penyebab keberhasilan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP triwulan II Tahun 2024 disebabkan oleh banyak dan beragamnya informasi mengenai ketersediaan pembelajaran dalam bentuk diklat, bimbingan teknis, seminar/webinar, dan

workshop yang bisa diakses oleh ASN Puslat KP yang mendorong terpenuhinya variabel-variabel terhadap penilaian komponen IP ASN oleh seluruh pegawai lingkup Puslat KP. Kegiatan pendukung capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP antara lain :

- 1) Monitoring kegiatan pembelajaran dan peningkatan kapasitas ASN Puslat KP dan melakukan updating dan reminder secara berkala.
- 2) Komitmen seluruh ASN Puslat KP dalam pemenuhan capaian IP ASN.

Indikator Kinerja IKSK.07.06 - Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslat KP (%)

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari pada itu, penting untuk menjaga pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini adalah IKU yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

IK Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslat KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar $\leq 0,5\%$.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah adanya audit oleh BPK -RI pada semester I kemarin sudah keluar LK Audited, sementara Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP tidak ditemukan adanya temuan BPK RI.

Indikator Kinerja IKSK.07.07 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslat KP (%)

IKU secara definisi adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP. IKU

ini yang mengukur komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan serta inisiasi kegiatan seperti Tindak Lanjut Temuan dengan melakukan pendampingan ke satuan kerja dan kegiatan tindak lanjut temuan yang diadakan secara regional dengan melibatkan tim Itjen.

Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslat KP Pada Triwulan II Tahun 2024 mengacu kepada Surat a.n. Kepala BPPSDM, Plt.Sekretaris BPPSDM Nomor :B.5406/BPPSDM.1/HP.510/VII/2024 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024”, tanggal 10 Juli 2024, Puslat KP tidak terdapat temuan atau 0, sehingga capaian IKUnya disesuaikan target yaitu 82% atau 100,00%.

Tabel 31. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

Realisasi TW 2 Puslatluh KP				2024					Renstra PUSLATLUH KP 2020 – 2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW2	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024	Target 2024	% Capaian thd target 2024
	97,56	100	75	82	82	82	100	9,33	82	100

Capaian IKK diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Triwulan IV Tahun 2023) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2024 (Triwulan I Tahun 2024). Sebagaimana IKK ini diterapkan diseluruh unit eselon II maka capaian kinerja Puslat KP dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan Tahun 2024 dapat dibandingkan dengan unit Eselon II lainnya. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain lingkup BPPSDM KP, Pusluh KP dan Puslat KP memiliki nilai yang sama 82% dengan persentase capaian yang sama sebesar 100,00% karena tidak memiliki temuan.

Tabel 32. Perbandingan IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

	Sekretariat BPPSDM	Pusluh KP	PusdikKP	Puslat KP	BBRP2BKP	BBRSEKP
Target	82	82	82	82	82	82
Realisasi	93,22	82	100	82	100	100
%	113,68	100,00	121,95	100,00	121,95	121,95

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain terlaksananya administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik. Serta antisipasi permasalahan atau adanya kesalahan dalam administrasi. terselesaikannya dokumen tindaklanjut yang baik dengan koordinasi yang baik.

Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja ini dipengaruhi oleh terselesaikannya tindaklanjut hasil pengawasan yang dikerjakan, komitmen pimpinan bersama tim keuangan maupun perbendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam proses administrasi keuangan.

Indikator Kinerja IKS.07.08 - Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslat KP (Inovasi)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (self-assessment). PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah d.h.i KKP dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan

proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup BPPSDMKP Tahun 2023 tersebut bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB Tahun 2023 lingkup BPPSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BPPSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 26 Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB KKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup KKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker terkait, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB. Dalam rangka PMPRB tersebut, Inspektorat Jenderal KKP perlu menilai kesesuaian pemenuhan dokumen dengan matriks penilaian mandiri (self assessment).

Secara umum, evaluasi PMPRB lingkup KKP Tahun 2023 bertujuan antara lain: 1) mendapatkan data dan informasi pelaksanaan RB TA 2023 lingkup BPPSDMKP, 2) meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB BPPSDMKP Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor: 30 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya, 3) menilai kemajuan pelaksanaan RB BPPSDMKP yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi lingkup BPPSDMKP, dan 4) memberikan saran untuk perbaikan nilai PMPRB sebelum dilakukan finalisasi penilaian. Setelah dilakukan evaluasi, umumnya dilakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian PMPRB yang telah dilaksanakan, agar dilakukan perbaikan oleh Satker lingkup BPPSDMKP, sebelum dilakukan penilaian final melalui aplikasi PMPRB online milik KeMenPAN-RB.

IK Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslat KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 1 Inovasi.

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah penyampaian usulan proposal Inovasi Pelayanan Publik dari BPPP Medan ke Sekretariat BPPSDM KP untuk dilakukan penilaian awal terkait pelayanan pendaftaran peserta Pelatihan, Uji Kompetensi dan Penggunaan Sarana dan Prasarana secara online. Inovasi ini

merupakan pengembangan Website BPPPMedan yang semula diberi nama BOSS PTSP (BPPP Medan One Stop Service Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menjadi Si Pelatih Aksi (Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan, Akomodasi dan Sertifikasi). Sebagai informasi, pada update dan penambahan fitur terbaru kami akan meningkatkan keamanan data peserta dan masyarakat dengan menggunakan Payment Gateway.

Indikator Kinerja IKSK.07.09 - Nilai PM SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri KP No. 68 Tahun 2017 tentang SAKIP, tujuan pelaksanaan SAKIP adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan disertai alat bukti. SAKIP membantu kita untuk memberikan pedoman proses/tahapan pencapaian tujuan organisasi yang valid, measurement, dan akuntable, serta memberikan informasi kepada kita posisi pencapaian kinerja yang telah dihasilkan. (apakah berhasil ataukah gagal).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, salah satu pengendalian dan fasilitasi dalam pengelolaan kinerja dalam adalah dalam bentuk Advisory Services (pendampingan dalam rangka perbaikan kinerja). Salah satu bentuk implemementasi di BPPSDM berupa inisiasi metode pendampingan evaluasi SAKIP mandiri dan rekon kinerja pada seluruh satker secara berjenjang yang dilakukan BPPSDM, mulai diadopsi untuk lingkup KKP. Begitupula evaluasi berbasis aplikasi menjadi nilai inovasi bagi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP, menjadikan BPPSDM mendapatkan nilai lebih dalam pengelolaan kinerja. IK Nilai PM SAKIP Pusat Pelatihan KP ini tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024.

IK Nilai PM SAKIP Pusat Pelatihan KP tidak memiliki target pada rencana aksi triwulan II tahun 2024. Target IK ini diukur pada periode triwulan IV dengan target tahunan sebesar 81 (Nilai).

Progress kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP Level III Lingkup Pusat Pelatihan KP di Medan pada Juni 2024;
- 2) Penilaian PM SAKIP Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan nilai sementara 83,60;
- 3) Finalisasi nilai PM sakip lingkup Pusat Pelatihan KP masih menunggu penilaian lingkup BPPSDM KP.

Akuntabilitas Keuangan

Pusat Pelatihan KP dan UPT Pusat Pelatihan KP memiliki Pagu awal sebesar Rp. 379.269.496.000 dan pagu yang aktif sebesar Rp. 365.601.980.000. Berdasarkan data, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, realisasi keuangan Pusat Pelatihan KP dan UPT sebesar Rp. 208.773.630.751 atau sebesar 57,58% dari Pagu Aktif. Untuk Pusat Pelatihan KP sendiri memiliki pagu awal sebesar Rp.16.615.261.000 dan pagu aktif dengan jumlah yang sama. Realisasi anggaran Pusat Pelatihan KP sebesar Rp. 7.360.406.432 yakni 44,30 % dari Pagu Aktif Pusat Pelatihan KP.

Tabel 33. Realisasi Keuangan Lingkup Pusat Pelatihan KP

NO	UPT PUSLAT	JUMLAH			
		Pagu AWAL (Rp)	Pagu AKTIF (Rp)	Realisasi (Rp)	%-ase (dari pagu Aktif)
1	Puslatluh	16.526.302.000	14.476.302.000	5.876.562.226	40,59%
2	BDA Sukamandi	16.615.261.000	16.615.261.000	7.360.406.432	44,30%
3	BPPP MEDAN	69.094.913.000	64.967.997.000	41.748.765.620	64,26%
4	BPPP TEGAL	56.331.995.000	54.019.795.000	28.338.205.442	52,46%
5	BPPP BANYUWANGI	106.425.832.000	103.646.632.000	59.118.990.617	57,04%
6	BPPP BITUNG	55.486.190.000	53.252.790.000	33.166.074.427	62,28%
7	BPPP AMBON	58.789.003.000	55.623.203.000	33.164.625.987	59,62%
	TOTAL	379.269.496.000	362.601.980.000	208.773.630.751	57,58%

Secara umum kinerja Pusat Pelatihan KP Tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

- Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran/rencana operasional kegiatan yang sudah disusun;
- Perencanaan yang cermat terkait jadwal kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi deviasi yang tinggi antara rencana penggunaan anggaran dan realisasinya;
- Untuk penghematan anggaran, memantau dan memastikan bahwa target yang sudah ditetapkan dalam renja tetap sejalan

Tabel 34. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Utama dan Pendukung IK Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Capaian TW II	%	RO Pendukung	Pagu Anggaran (%)	Realisasi Anggaran
1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	75	0	0	-	2375.SCC.001 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	59.384.560.000	31.015.554.598
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	35.713	21.126	26.228	120,00		59.384.560.000	31.015.554.598
3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP	13	6	10	120,00		59.384.560.000	31.015.554.598
4	Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Pusat KP	122	0	0	-		59.384.560.000	31.015.554.598
5	SDM KP yang bersertifikat kompetensi	1.450	428	666	120,00	2375.DDC.001 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi	699.780.000	146.453.271
6	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	147	0	0	-	2375.ABW.001 Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kaji Terap)	717.156.000	-
7	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya	5	0	0	-		717.156.000	-
8	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun	4	0	0	-	2375.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	4.000.000.000	341.308.304
9	Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan	7	0	0	-		4.000.000.000	341.308.304
10	Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	75	0	0	-		4.000.000.000	341.308.304
11	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti	12	8	9	112,50		4.000.000.000	341.308.304
12	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya	6	0	0	-	2375.RAL.001 Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4.778.118.000	1.295.208.640
13	Prasarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya	5	0	0	-	2375.RBQ.001 Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4.545.000.000	3.169.945.200
14	Aparatur KP yang dilatih	5.165	2.920	3.404	116,58	4345.EBC.996 Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten	5.500.000.000	1.744.980.252
15	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur	1	0	0	-		5.500.000.000	1.744.980.252
16	Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	0	0	-		5.500.000.000	1.744.980.252

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW II	Capaian TW II	%	RO Pendukung	Pagu Anggaran (%)	Realisasi Anggaran
17	Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan	5	0	0	-		5.500.000.000	1.744.980.252
18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP	100	50	55	110,00	WA.2378 Dukman dan Operasional Lingkup Puslat KP	36.520.712.000	10.195.139.543
19	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP	1	0	0	-	WA.2378 Perencanaan Movev Pelaporan	136.200.000	15.765.993
20	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP	94	0	0	-	WA.2378 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Puslat KP	624.900.000	391.140.683
21	Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	94	94	112	118,94	WA.2378 Belanja Pegawai Lingkup Puslat KP	261.827.473.000	142.142.722.225
22	Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP	81	76	81	106,01	WA.2378 Belanja Pegawai Lingkup Puslat KP	261.827.473.000	142.142.722.225
23	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Puslat KP	≤ 0,5	0	0	-	WA.2378 Pelayanan Keuangan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Puslat KP	275.819.000	83.124.198
24	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslat KP	82	82	82	100,00	WA.2378 Pelayanan Keuangan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Puslat KP	275.819.000	83.124.198
25	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Puslat KP	1	0	0	-	WA.2378 Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Pelatihan dan Penyuluhan	191.400.000	108.057.118
26	Penilaian Mandiri SAKIP Puslat KP	81	0	0	-	WA.2378 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Puslat KP	303.900.000	76.205.867

Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya Pusat Pelatihan KP

Pusat Pelatihan KP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merealisasikan penggunaan anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan. Efisiensi diperlukan dalam menggunakan anggaran yang ada dengan bijak untuk merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang maksimal. Dengan adanya angka efisiensi maka dapat ditelaah lebih lanjut apakah kinerja organisasi sudah efektif atau hanya pemborosan anggaran.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Pada peraturan yang sama juga dinyatakan bahwa batas maksimum nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimum adalah -20%. Dengan asumsi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin efisiensinya mendekati 20% maka kinerja kegiatan dan anggaran semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dengan menggunakan rumus diatas, didapatkan angka efisiensi **Pusat Pelatihan KP** pada tahun 2024 sebesar 17,09 atau dengan arti Nilai Efisiensi Kinerja anggaran Pusat Pelatihan KP sebesar 80% yang dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Pusat Pelatihan KP masuk dalam kategori **Baik**.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai **efisiensi anggaran** pada Pusat Pelatihan KP yaitu;

1. **Perencanaan (Anggaran)**

Efisiensi anggaran dilakukan Pusat Pelatihan KP dalam beberapa dimensi, yaitu:

Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 Pusat Pelatihan KP telah menetapkan kegiatan prioritas, yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai serta melaksanakan kegiatan yg menggunakan blended dilaksanakan dengan online sehingga menghemat anggaran.

Dimensi efisiensi ketiga berupa melakukan Kerjasama dengn Instansi lain K/L, NGO, Pihak Swasta dalam menghemat penggunaan anggaran kegiatan pelatihan KP.

Dimensi efisiensi keempat berupa refofusing anggaran pada pemangkasan alokasi anggaran belanja modal, perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Dukungan Pusat Pelatihan KP dalam pencapaian upaya dimaksud dengan melakukan reuiu penganggaran secara berjenjang yang melibatkan *stakeholder* meliputi reuiu anggaran tingkat Pusat Pelatihan KP, reuiu anggaran tingkat KKP (Itjen dan Setjen), dan reuiu K/L (DJA dan Bappenas).

2. **Pelaksanaan Kegiatan**

Strategi pelaksanaan kegiatan untuk meminimalkan serapan anggaran terutama untuk perjalanan dinas

- 1) Sinergitas pelaksanaan kegiatan antar satker dan pusat dalam satu rangkaian
- 2) Mengutamakan pertemuan di ruang rapat internal atau satker-satker Pusat Pelatihan KP
- 3) Mengutamakan kegiatan pelatihan dengan metode online

- 4) Sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui *video conference* dan *live streaming*
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan atasan berbasis *Balance Score Card* dan SKP.
- 6) Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
- 7) Mengadakan Pelatihan masyarakat dan aparatur dengan via Daring/online sehingga menghemat anggaran.
- 8) Penguatan SDM Pusat Pelatihan KP dan UPT dalam meningkatkan kompetensi dan skill nya

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran satker lingkup Pusat Pelatihan KP agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang-undangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, E-Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, Simlat, e-pelaporan, serta Dashboard dan *Weekly Report* BPPSDM
- 2) Melaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan Pusat Pelatihan KP dengan virtual. Hal tersebut memangkas perjalanan dinas dan pertemuan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang signifikan
- 3) Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



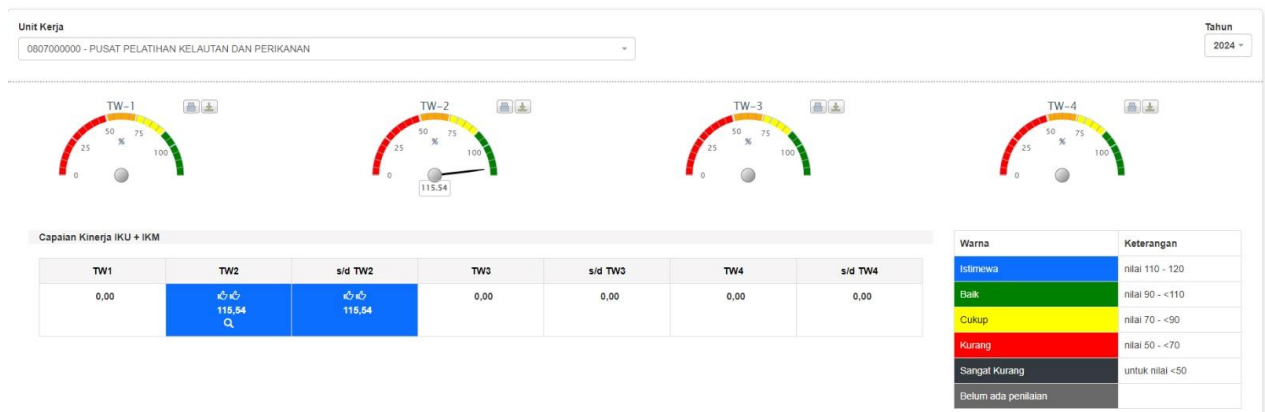
penutup



BAB IV - PENUTUP

Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Pusat Pelatihan KP triwulan II Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaku yang dapat diakses secara daring pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian nilai kinerja Pusat Pelatihan KP pada Tahun 2024 adalah **115,54%** seperti pada tampilan grafik dashboard dibawah ini :



Adapun untuk Triwulan II, IK yang telah memiliki output capaian yakni :

- 1) **IKSK.01.02** - Capaian IKU jumlah masyarakat yang dilatih pada triwulan II tahun 2024 sebesar 26.228 orang atau sebesar 120% dari target triwulan II. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 74,57%. Realisasi Triwulan 2 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 198,23% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Terhadap target Renstra Tahun 2024 capaian Triwulan 2 sebesar 73,44%. Berdasarkan target Jumlah Lulusan Pelatihan masyarakat yang dilatih pada masa periode Renstra 2020-2024 sebanyak 121.226 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 116.999 orang atau mencapai 96,51%.
- 2) **IKSK.01.03** - Capaian IKU Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP pada Triwulan 2 Tahun 2024 sebesar Rp.10.131.477.685,-. Atau 120% dari target Triwulan 2 sebesar Rp5.940.000.000,-. Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar Rp13.415.665.000,-. maka realisasi mencapai 75,51%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 2 pada tahun 2023 sebesar

Rp4.360.000.000,- ada kenaikan sebesar 232,34% dari Tahun 2023. Berdasarkan target kumulatif nilai PNBPN Satker lingkup Pusat Pelatihan KP pada Renstra 2020-2024 sebesar 27,18 Milyar Rupiah, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 29,56 Milyar Rupiah (108,75%). Dari data tersebut, terlihat bahwa semua Satker telah mencapai 120% dari target TW 2 nya, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai target PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). BPPP Tegal memiliki nilai target tahunan dan capaian TW 2 tertinggi di antara semua Satker, diikuti oleh BPPP Medan dan BPPP Banyuwangi.

- 3) **IKSK.02.01** - Capaian IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada triwulan II tahun 2024 sebesar 666 orang atau sebesar 120% dari target triwulan II. Jika dibandingkan dengan target tahunannya telah mencapai 45,93%. Realisasi Triwulan 2 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,38% jika dibanding tahun 2023 di triwulan yang sama. Berdasarkan target SDM KP yang bersertifikat kompetensi pada periode Renstra 2020-2024 sebanyak 4.308 orang, realisasi sampai dengan Triwulan 2 tahun 2024 ini adalah sebanyak 3.593 orang atau mencapai 83,4%. Berdasarkan bidang kompetensinya realisasi pada triwulan II ini Budidaya sebanyak 85 orang, Perikanan Tangkap sebanyak 540 orang dan Manajemen sebanyak 41 orang. Sertifikasi Perikanan Tangkap ini sebagian besar merupakan sertifikasi untuk awak kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dari DJPT ataupun dari BPPSDM pasca pelimpahan kewenangan terkait sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan
- 4) **IKSK.04.04** - Pada triwulan II tahun 2024 ini capaian untuk jumlah jejaring dan/atau kerjasama Pusat Pelatihan KP sudah ada capaian 9 PKS dengan target triwulan II sebanyak 8 PKS (112,50%) dari target tahunan sebanyak 12 PKS (75%). Realisasi triwulan II tahun 2023 sebesar 10 kerjasama sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2023 adanya penurunan sebesar 10%.
- 5) **IKSK.06.01** - Target kinerja triwulan II tahun 2024 ini sebanyak 2920 orang, dan realisasi mencapai 3404 orang (116,58%). Bila dibandingkan dengan target tahun 2024, realisasi sudah mencapai 65,91%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan 2 tahun 2023 sebanyak 3801 orang maka terjadi penurunan sebanyak 10,44%. Apabila melihat target Renstra 2020-2024 kumulatif sebesar 22.690 orang, sampai triwulan II tahun 2024 ini sudah tercapai sebanyak 28.312 orang atau 124,77%.

- 6) **IKSK.07.01** - Capaian TW II Tahun 2024 sebesar 55% dari target Triwulan 2 sebesar 50%. dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan sedikit dari realisasi capaian sebesar 27,96%. Untuk bukti capaian IKU ini diperoleh Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker antara lain Dokumen Perencanaan Anggaran 2025, dokumen revisi perencanaan anggaran 2024, dokumen perencanaan kinerja, dokumen reuiu renstra, dokumen laporan kinerja, dokumen laporan SPIP, dokumen realisasi anggaran, dokumen laporan PNBPN, dokumen weekly report, laporan keuangan, laporan BMN, laporan PM SAKIP, dan laporan PIPK Tahun 2024.
- 7) **IKSK.07.04** - Capaian IK Persentase unit kerja Puslat KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar Pada triwulan II ini yakni 111,80% dari target triwulan II sebesar 94% (118,94%). Capaian triwulan II tahun 2024 ini mengalami peningkatan dibandingkan capaian di triwulan II tahun 2023 (100%). Di triwulan I tahun 2024 IK ini mengalami perubahan yakni perbedaan aplikasi yang dipergunakan oleh user yang sebelumnya menggunakan aplikasi Bitrix24.kkp menjadi aplikasi cofis.kkp.
- 8) **IKSK.07.05** - Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Puslat KP ini diukur di Triwulan II dan triwulan IV. Di Triwulan II, berdasarkan surat Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor B.5448/BPPSDM.1/TU.210/VII/2024, capaian IP ASN Puslat KP sebesar 80,57 dari target triwulan II sebesar 76 (106,01). Adapun untuk capaian triwulan II tahun 2024 dibandingat triwulan II tahun 2023 sebesar 78,19 menunjukkan adanya peningkatan. Capaian triwulan II dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 81 masih kurang 0,43%.
- 9) **IKSK.07.07** - Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Puslat KP Pada Triwulan II Tahun 2024 mengacu kepada Surat a.n. Kepala BPPSDM, Plt.Sekretaris BPPSDM Nomor :B.5406/BPPSDM.1/HP.510/VII/2024 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024”, tanggal 10 Juli 2024, Puslat KP tidak terdapat temuan atau 0, sehingga capaian IKUnya disesuaikan target yaitu 82% atau 100,00%.

Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun secara umum kinerja untuk triwulan II tahun 2024 ini Pusat Pelatihan KP telah mampu merealisasikan target kinerjanya, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dengan rekomendasi sebagai alternatif solusi demi tercapainya target kinerja yang ditetapkan.

Dari hasil pengukuran yang dilakukansampai dengan Triwulan II tahun 2024 terdapat permasalahan yaitu Data Dukung capaian masih belum rapi dan seragam dalam pengisian matrik capaiannya.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja Pusat Pelatihan KP pada Triwulan mendatang, yaitu:

1. Akselerasi kegiatan pelaksanaan pelatihan yang realisasinya masih sedikit di Triwulan III
2. Mengadakan Pertemuan pendampingan data dukung dengan Satker lingkup Pusat Pelatihan KP secara kontinu;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang menjadi prioritas KKP dan Nasional.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



lampiran

LAMPIRAN

PK Pusat Pelatihan KP April 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bersdam@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : **Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : **Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 April 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan


Lilly Aprilya Pregiwati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2024
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	72
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	35.173
		3	Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Pelatihan KP (Rupiah Milyar)	13,416
		4	Tenaga kerja yang terlibat di Lingkup Puslat KP (orang)	122
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	5	SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)	1.450
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	6	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	147
		7	Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	5
4	Tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP	8	Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Pelatihan dan Sertifikasi yang disusun (NSPK)	4
		9	Kelembagaan Pelatihan yang tersertifikasi sesuai standar lembaga pelatihan (Lembaga)	7
		10	Persentase Usulan Sertifikasi Program Diklat Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan yang disahkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)	75
		11	Jejaring dan/atau kerjasama lingkup Pusat Pelatihan KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	12
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan	12	Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	6

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2024
	dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	13	Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)	5
6	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih	14	Aparatur KP yang dilatih (orang)	5.165
		15	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat Aparatur (Lembaga)	1
		16	Persentase partisipasi unit organisasi dalam rangka implementasi Corporate University di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	10
		17	Lembaga/ Instansi yang memanfaatkan fungsi pelayanan Peningkatan Kompetensi ASN Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	5
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	18	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan KP (%)	100
		19	Unit kerja lingkup Pusat Pelatihan KP yang lolos penilaian WBK, Tim Penilai Internal KKP (Satker)	1
		20	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusat Pelatihan KP (Nilai)	94
		21	Persentase unit kerja Pusat Pelatihan KP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		22	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Pelatihan KP (indeks)	81
		23	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Pusat Pelatihan KP (%)	≤ 0,5
		24	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pelatihan KP (%)	82
		25	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Pusat Pelatihan KP (Inovasi)	1
		26	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Pelatihan KP (Nilai)	81

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 74.124.614.000
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	Rp 5.500.000.000
3	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM	Rp 299.160.882.000
Total Anggaran Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP		Rp 378.785.496.000

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radarta

Jakarta, 2 April 2024
Pihak Pertama
Plt. Kepala Pusat Pelatihan KP


Lilly Aprilya Pregiwati

Tabel 35. Link Data Dukung Capaian IK

No.	Kode	Link Data Dukung
1	IKSK.01.02	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439511721006288.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/022024439511721006288.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/032024439511721006288.pdf
2	IKSK.01.03	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439521720776982.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/022024439521720776982.pdf
3	IKSK.02.01	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439531721006289.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/022024439531721009054.pdf
4	IKSK.04.04	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439681721013673.pdf
5	IKSK.06.01	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439721721006289.pdf https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/022024439721720776982.pdf
6	IKSK.07.01	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439541720776983.pdf
7	IKSK.07.04	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439601720776983.pdf
8	IKSK.07.05	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439621721003713.pdf
9	IKSK.07.07	https://kinerjaku.kkp.go.id/app/assets/upld/2024/012024439661720776983.pdf